

Model Bauran Terintegrasi Dalam Meningkatkan Peran Dan Fungsi Koperasi Rukun Tetangga

Di Kabupaten Wonogiri : Studi Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat

Hendar

Moh. Ali Shahab

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Abstrak

Masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menentukan keberhasilan pemberdayaan (kinerja pemberdayaan). Beberapa faktor strategis yang sudah dilaksanakan seperti pemberdayaan kelembagaan koperasi, peningkatan akses terhadap sumber dana, pemberdayaan sumber daya, pemberdayaan bidang produksi, pengembangan jaringan pemasaran, dan pemberdayaan teknologi dan informasi diteliti secara intensif untuk mengetahui faktor mana saja yang dominan mempengaruhi kinerja pemberdayaan. Penelitian dilakukan terhadap 156 anggota koperasi dengan menggunakan analisis diskriminant. Hasil penelitian menunjukkan kinerja pemberdayaan sangat tergantung pada sikap anggota koperasi dalam merespon pemberdayaan kelembagaan, pemberdayaan teknologi dan informasi, dan pengembangan jaringan pemasaran, sementara variabel-variabel yang lain seperti pemberdayaan bidang produksi, peningkatan akses terhadap sumber pendanaan dan pemberdayaan sumber daya koperasi bukanlah variabel yang mempengaruhi kinerja pemberdayaan.

Kata Kunci : Bauran terintegrasi, kinerja pemberdayaan

Abstract

The problem of this study are the factors that determine the success of empowerment (empowerment performance). Some strategic factors that have been implemented, such as empowering the cooperative institution, increasing access to sources of fund, empowering the cooperative resource, empowering the production, developing marketing network, and empowering the information and technology were intensively studied to determine which factors are the dominant influence on the performance of the empowerment. The research was conducted on 156 members of the cooperative samples were analyzed by using analytical diskriminant. The results showed that the performance of empowerment depends on the attitude of members of the cooperative in responding the institution empowerment, empowerment of information and technology, and the development of marketing network, while other variables such as empowering the production, increasing access to sources of fund, and empowering the cooperative resource are not effects by empowerment performance.

Keywords: Integrated mix, empowerment performance

PENDAHULUAN

Koperasi adalah organisasi yang mengelola diri sendiri dengan prinsip demokratis dan berusaha memenuhi kebutuhan anggotanya serta meningkatkan kesejahteraan social baginya (Mojtahed, 2007). Menurut Farazmand (2006), koperasi merupakan system organisasi kerjasama dan pengelolaan mandiri yang menonjolkan transparansi dan kepercayaan, berfungsi sebagai patner pemerintah dalam pembangunan social ekonomi dan pengembangankapasitasnasional. Koperasi diharapkan memiliki peran yang besar dalam memajukan ekonomi kerakyatan (Pasal 33 UUD 1945), meningkatkan kontribusi lembaga ini terhadap PDRB, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil. Sayangnya, harapan yang besar dari peran koperasi tersebut belum terbukti secara nyata. Hingga saat ini peran koperasi masih sangat rendah (kurang dari 5% terhadap PDRB) dan memiliki daya saing yang rendah pula, sehingga koperasi sulit bersaing dengan usaha-usaha lainnya.

Sejak dimulainya pola pembangunan ekonomi di Indonesia berbagai strategi dan kebijakan telah diterapkan dalam rangka menunjang perkembangan perkoperasian. Program pembangunan pemerintah yang tepat seperti pembangunan daerah pedesaan dan pertanian atau program untuk kepentingan kelompok-kelompok sasaran tertentu memang dapat dilaksanakan oleh koperasi secara otonom dan atas dasar sukarela (Hanel, 1983). Koperasi-koperasi dilibatkan dalam pelaksanaan berbagai proyek dan program untuk penyaluran kredit-kredit pertanian (KUT), pengadaan sarana produksi, pemasaran dan pengolahan

hasil pertanian, dan lain-lain, dengan tujuan mengentaskan kemiskinan. Program ini ternyata tidak sepenuhnya berhasil dengan baik. Pada sekitar tahun 70-an pelaksanaan pembangunan ekonomi melalui gerakan koperasi mendapat kritik terutama karena gerakan koperasi kenyataannya tidak mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mengubah struktur kekuasaan sosial politik bagi golongan masyarakat miskin (Hanel, 1983).

Berdasar pada semangat UUD 1945 Pasal 33, pemberdayaan koperasi merupakan sebuah keniscayaan. Koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Sudah sepatutnya koperasi dijadikan motor pertumbuhan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama anggota-anggota koperasi. Di sinilah kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan tanggungjawab kelembagaan koperasi, artinya koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat perlu diberdayakan agar cita-cita bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat terwujud.

Pada tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Wonogiri melakukan gerakan koperasi melalui pendekatan kewilayahan setingkat Rukun Tetangga (RT) yang berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro dalam lingkup rukun tetangga (RT). Gerakan ini bermaksud mendorong masyarakat khususnya di daerah pedesaan yang memiliki kesamaan kepentingan dan kebutuhan yang sama akan mudah terdorong membentuk usaha swadaya masyarakat. Program ini kemudian dinamakan "Program Mengangkat

Ekonomi Kerakyatan Melalui Koperasi Rukun Tetangga (RT) dalam Rangka Ketahanan Desa di Kabupaten Wonogiri". PengelolaankoperasiRTdenganmanajemen baik diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta dapat menjadi pemangku kebijakan ekonomi tingkat desa.

Gerakan pendirian Koperasi RT merupakan upaya pemberdayaan masyarakat melalui memanfaatkan potensi kegiatan ekonomi pada komunitas di tingkat Rukun Tetangga (RT). Meskipun demikian, dalam implementasi kebijakan, program ini masih berdasarkan pada pendekatan "top down" yang menyimpang dari semangat koperasi yang bersifat "bottom up". Padahal model pengembangan koperasi dengan cara "top down" telah dilakukan Indonesia pada masa awal pemerintahan orde baru, yakni melalui pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) telah dianggap gagal dalam menciptakan koperasi yang mandiri.

Dari ribuan KUD yang dibentuk saat awal pemerintahan orde baru, hanya sedikit yang masih bisa bertahan sampai sekarang. KUD yang dianggap telah mempunyai status mandiri sekarang ini banyak yang hanya besar unit usahanya (kadang-kadang SHU-nya juga besar), tapi cita-cita koperasi dalam mengangkat kesejahteraan anggota nampaknya masih jauh dari harapan. Menurut Hendar (2010), ketidakmampuan KUD dalam mencapai cita-citanya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya, (1) proses pendirian KUD menyimpang dari hakekat koperasi yang sebenarnya, sehingga anggota tidak

merasa memiliki koperasi dan akibatnya mereka lemah dalam partisipasi, (2) partisipasi anggota yang rendah yang ditunjang oleh pengetahuan anggota tentang perkoperasian yang kurang, dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dalam jajaran manajemen KUD untuk berperilaku oportunistik terhadap bantuan-bantuan program pemerintah, dan (3) pengetahuan pengurus dan pengelola yang rendah tentang perkoperasian memungkinkan KUD dikelola sebagai organisasi bisnis yang tidak berbeda dengan organisasi bisnis lain yang profit oriented.

Meskipun pola pengembangan koperasi (KUD) melalui pola "top down" telah dianggap gagal, namun beberapa Pemerintah Daerah masih percaya bahwa pola ini tidak selamanya akan menghasilkan kegagalan. Beberapa pemerintah daerah masih percaya bahwa pola "top down" dalam pengembangan koperasi rukun tetangga (RT) dapat menghasilkan koperasi mandiri yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tantangan pengembangan koperasi seperti ini cukup besar karena struktur kelembagaan koperasi RT yang dibangun oleh Pemerintah Daerah pada masyarakat melalui kelembagaan sosial Rukun Tetangga (RT), tidak secara otomatis dapat diikuti dengan perubahan nilai-nilai yang ada di masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang dikehendaki gerakan koperasi.

Pemberdayaan koperasi RT menuntut perhatian Pemerintah Daerah, terutama dalam intervensi pada kemudahan dan fasilitasi permodalan usaha, sistem pembinaan manajemen usaha, pelatihan dan peningkatan skill, ketersediaan bahan

baku dan penunjang lain guna kelangsungan produktivitas usaha, serta pembentukan jaringan distribusi dan pemasaran hasil usaha koperasi dan anggotanya.

Pada beberapa negara, termasuk diantaranya di Afrika Selatan, pemerintah ikut serta dalam mendorong pembangunan koperasi. Undang-Undang Koperasi No 14 tahun 2005 dibuat untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan koperasi di Afrika Selatan dan menggunakan UU ini sebagai kendaraan untuk mengembangkan usaha kecil. Selain itu, dianjurkan bahwa dukungan awal pemerintah harus tersedia untuk semua kelompok produsen yang secara resmi mendaftarkan bisnis mereka, terlepas dari model bisnis yang dipilih, dan bahwa pemberdayaan anggota harus menjadi persyaratan penting untuk pendaftaran dan pendanaan publik (P [Nganwa](#), [M Lyne](#) & [S Ferrer](#), 2010).

KAJIAN PUSTAKA

Koperasi merupakan organisasi social ekonomi yang didisain menurut konsep pemberdayaan, sehingga partisipasi aktif anggota dalam berbagai kegiatan koperasi merupakan wujud kontribusi mereka dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi merupakan roh pemberdayaan masyarakat (Wignyo Adiyoso, 2009). Partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat merupakan pengakuan terhadap eksistensi individu dan masyarakat sebagai pemegang kekuasaan atas pembangunan (Plummer, 2000). Salah satu program pemberdayaan yang dengan jelas mengadopsi partisipasi masyarakat adalah pembentukan koperasi Rukun Tetangga (RT).

Pemberdayaan merupakan bagian dari pengembangan masyarakat (Wignyo

Adiyoso, 2009). Pengembangan masyarakat adalah proses, tugas dan visi untuk memberdayakan masyarakat agar bersama-sama bertanggung jawab untuk mengembangkan dirinya (Kenny, 1999). Pengembangan masyarakat muncul karena meningkatnya tuntutan masyarakat karena adanya masalah-masalah yang terkait dengan ekologi, ekonomi, politik, sosial dan budaya akibat globalisasi (Taylor, 2003). Sedangkan menurut Suharto (2005) pengembangan masyarakat muncul atas respon terhadap kebijakan yang kental dengan ekonomineo-liberal, yakni kebijakan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan sering mengabaikan dimensi sosial dan budaya masyarakat.

Pemberdayaan merupakan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumberdaya untuk mencari nafkah (Pranarka, 1996; Lubis, dkk., 2005), upaya mendapatkan kekuatan (*power*) dan mengkaitkannya dengan kemampuan golongan miskin untuk mendapatkan akses ke basis kekuasaan sosial (Friedmann, 1992), upaya untuk memberikan power (daya/kuasa) kepada kelompok yang tidak berdaya/berkuasa sehingga mereka menjadi berdaya (Wignyo Adiyoso, 2009), dan proses untuk meningkatkan kapasitas individu dalam menentukan pilihan dan mewujudkan pilihan tersebut dalam tindakan nyata (Gibson & Woolcock, 2005).

Pemberdayaan dilakukan untuk mencapai tujuan meningkatkan kekuasaan kepada orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995). Dengan demikian, pemberdayaan berkaitan dengan peningkatan sumberdaya dan kemampuan

masyarakat miskin untuk berpartisipasi, memutuskan, mengontrol dan terlibat setiap proses yang mempengaruhi kehidupan masyarakat (Wignyo Adiyoso, 2009).

Pemberdayaan menekankan bahwa setiap orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Dalam proses ini masyarakat didampingi dalam menganalisis masalah yang dihadapi, dibantu menemukan alternatif solusi atas masalah yang dihadapi, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai sumberdaya yang dimiliki dan dikuasainya. Oleh karena itu, keberhasilan pemberdayaan (termasuk anggota koperasi) paling tidak dapat diukur dari empat indikator, yaitu : (a) perubahan dalam kemampuan masyarakat dalam merencanakan dan mengelola program pembangunan, (b) meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan, (d) peningkatan kepedulian dan peran pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dan (d) hasil serta dampak ekonomi nyata sebagai hasil kegiatan ekonomi produktif masyarakat (Wignyo Adiyoso, 2009).

Strategi pemberdayaan koperasi, yang diharapkan berdampak pada peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional, pada intinya akan mencakup beberapa isu penting, yaitu (a) revitalisasi peran koperasi dan perkuatan posisi koperasi dalam Sistem perekonomian nasional, (b) revitalisasi koperasi dilakukan dengan memperbaiki akses koperasi terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar serta memperbaiki iklim usaha, (c)

mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan, dan (d) mengembangkan potensi sumberdaya lokal. Dalam rangka memberdayakan KUMKM, Kementerian Koperasi dan UKM melakukan beberapa kegiatan antara lain, (1) Program penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UKM, (2) Program pengembangan sistem pendukung usaha KUKM, (3) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUKM, (4) Pemberdayaan usaha skala mikro, (5) Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

Mengacu pada beberapa program yang dijelaskan di atas, strategi bauran (*mix strategy*) dalam meningkatkan kualitas koperasi pada dasarnya tidak bisa lepas dari 6 strategi yang menjadi kunci penentu keberhasilan peningkatan kualitas koperasi yakni meliputi, (1) pemberdayaan kelembagaan, (2) peningkatan akses koperasi terhadap sumber-sumber pendanaan, (3) pemberdayaan sumber daya koperasi, (4) pemberdayaan di bidang produksi, (5) pengembangan jaringan pemasaran, dan (6) pemberdayaan teknologi dan informasi,

Di beberapa negara, pengembangan koperasi juga membutuhkan intervensi dari luar. Di Cina, koperasi-koperasi mengkombinasikan beberapa sumber daya, termasuk kontribusi anggota, modal institusional, dukungan keuangan publik, dukungan pemasaran, dan dukungan pihak swasta pemilik sumber daya, yakni para relawan dan donatur. Pengamatan empiris memberikan bukti bahwa terdapat proses transformasi pengelolaan koperasi pedesaan di Cina dari tradisi saling tolong

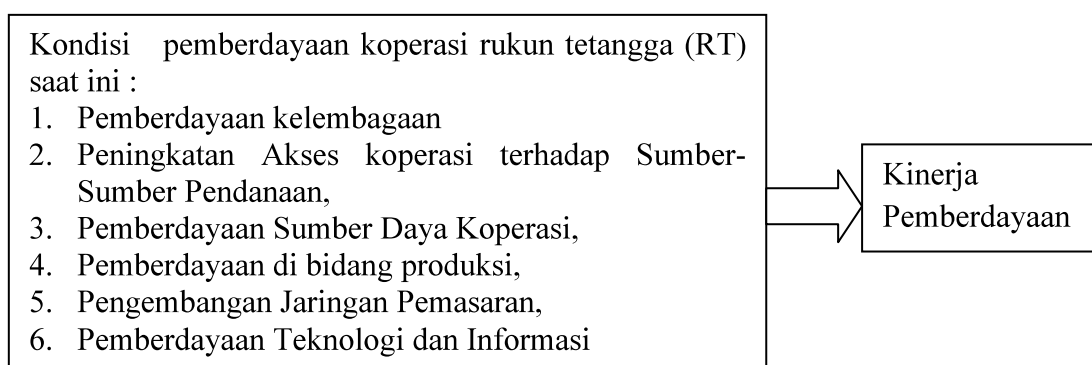
menolong dalam lingkup internal ke model baru dengan orientasi pasar eksternal yang memiliki karakter beragam (Zhao Li, Gijsselinckx C, 2011).

Strategi pengembangan “Model Bauran Terintegrasi” (*Integrated Mix Model*) dalam upaya mendorong perkembangan koperasi skala rumah tangga di Kabupaten Wonogiri baik secara kuantitas maupun kualitas ditujukan untuk memberi kontribusi bagi perekonomian daerah di Wonogiri. Strategi tersebut dijalankan dengan membuat model kebijakan pengembangan koperasi yang menggabungkan secara terintegrasi “strategi eksternal” yang berasal dari perangkat kebijakan Pemerintah Daerah dan Instansi yang terkait, dan “strategi internal” koperasi yang dilakukan oleh koperasi secara mandiri. Strategi eksternal diperlukan untuk memberi dampak pada kualitas koperasi rumah tangga, sedangkan “strategi internal” koperasi diperlukan untuk mendorong kuantitas operasional dan kelangsungan usaha, sekaligus kemampuan untuk melibatkan secara aktif peran partisipasi masyarakat baik sebagai

kelembagaan koperasi dan akses sumber pembiayaan menjadi ranah kebijakan “pemerintah daerah dan instansi terkait”.

Sedangkan pemberdayaan sumber daya koperasi, pemberdayaan di bidang produksi, pengembangan jaringan pemasaran, dan pemberdayaan teknologi dan informasi adalah wilayah kerja dan operasional koperasi yang bisa dikembangkan dan ditingkatkan secara internal oleh koperasi itu sendiri. Meskipun demikian, keberhasilan dari strategi internal sangat dipengaruhi juga bimbingan dan bantuan pihak eksternal, pemerintah daerah dan instansi terkait, serta tidak kalah pentingnya adalah partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha, terutama yang skala rumah tangga (mikro) dan kecil secara terintegrasi.

Kemudian dalam rangka mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan strategi peningkatan peran dan fungsi koperasi rukun tetangga (RT) dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, disusun kepangka penelitian empirik sebagai berikut :



Gambar 1 : Model Kerangka Pemikiran

anggota maupun sebagai mitra kerja koperasi. Strategi eksternal yang berupa pengembangan dan penguatan aspek

METODA PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota koperasi rukun tetangga (RT) di Kab.

Wonogiri. Anggota koperasi RT dipilih sebagai obyek penelitian karena anggota koperasilah yang menjadi sasaran akhir pemberdayaan dan yang dapat menilai efektif tidaknya proses pemberdayaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Jumlah anggota sampel yang diambil sebanyak 156 orang. Jumlah sebanyak itu dianggap representatif mengingat anggota koperasi RT memiliki karakteristik yang relative homogen terkait dengan pengetahuan mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui koperasi RT. Upaya meningkatkan fungsi dan peran kop-

erasi (Pemberdayaan koperasi RT) dapat dilakukan melalui strategi bauran, (a) pemberdayaan kelembagaan, (b) peningkatan akses koperasi terhadap sumber-sumber pendanaan, (c) pemberdayaan sumber daya koperasi, (d) pemberdayaan di bidang produksi, (e) pengembangan jaringan pemasaran, dan (f) pemberdayaan teknologi dan informasi. Masing-masing indikator diukur dengan skala 1 sampai 10. Skor 1 menunjukkan skala sangat tidak setuju atas pertanyaan yang diajukan dan skor 10 menunjukkan skor yang sangat setuju.

Tabel 1 : Variabel-variabel pemberdayaan dan indikator yang digunakan

Variabel Pemberdayaan	Indikator-indikator pemberdayaan koperasi RT
Pemberdayaan kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> a. penyederhanaan perizinan dan pengembangan system perizinan bagi pendirian usaha mikro anggota b. praktek penerapan Peraturan Daerah (Perda) untuk mendukung pemberdayaan koperasi, c. praktek pengembangan kualitas koperasi d. revitalisasi koperasi.
Peningkatan akses koperasi terhadap sumber pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan berbagai Skim Perkreditan untuk Koperasi b. pengembangan Lembaga Kredit Mikro baik bank maupun non bank c. bantuan perkuatan secara selektif sektor usaha tertentu sebagai stimulan
Pemberdayaan sumber daya koperasi	<ul style="list-style-type: none"> a. penumbuhan Wirausaha baru b. peningkatan kemampuan teknis dan manajerial Koperasi c. pengembangan kualitas layanan Koperasi, d. pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi kelompok usaha produktif, e. pengembangan prasarana dan sarana pendidikan dan pelatihan
Pemberdayaan di bidang produksi,	<ul style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan program pengembangan pengadaan pangan koperasi b. pelaksanaan program pengembangan usaha melalui pengadaan bibit c. pelaksanaan program pengembangan usaha budidaya perikanan dan peternakan d. pelaksanaan program pengembangan usaha sarana penunjang perikanan dan peternakan e. pelaksanaan program pengembangan usaha budidaya tanaman pekarangan
Pengembangan jaringan pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> a. praktek promosi proyek koperasi b. modernisasi usaha ritel koperasi c. pengembangan sarana pemasaran koperasi d. pengembangan <i>Trading Board</i> dan <i>Data Cente</i> e. pameran di dalam dan di Luar negeri.
Pemberdayaan teknologi dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. penyediaan perangkat keras, b. penyediaan perangkat lunak, c. penyediaan sistem jaringan, d. optimalisasi fungsi dan sasaran penggunaan teknologi dan jaringan.
Kinerja pemberdayaan	<ul style="list-style-type: none"> a. perubahan kemampuan masyarakat dalam merencanakan dan mengelola program pemberdayaan, b. peningkatan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pemberdayaan, c. hasil serta dampak ekonomi nyata sebagai hasil kegiatan ekonomi produktif masyarakat.

Sumber : Kajian beberapa literatur, 2011

Uji validitas digunakan untuk memastikan instrumen yang diajukan benar-benar dapat mengukur variabel. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila probabilitas (p) pengujian korelasi antara skor instrumen dengan total skor atau skor untuk variabel yang bersangkutan masih berada di bawah tingkat signifikansi 5%. Uji reliabilitas data dalam penelitian ini diperlukan untuk mengetahui konsistensi dari jawaban responden. Pengukuran mengenai konsistensi jawaban responden dilakukan dengan menghitung statistic *Cronbach's Alpha*. Sebuah instrument konstruk dinyatakan reliabel bila statistic *Cronbach's Alpha* berada lebih besar dari 0,60 (Imam Ghazali, 2005)

Alat analisis data menggunakan analisis diskriminan. Analisis diskriminan digunakan untuk menentukan mana prediktor yang paling dominan pada praktek penerapan strategi peningkatan fungsi dan peranan koperasi rukun tetangga (RT). Tujuan dari analisis diskriminan adalah untuk mengetahui perbedaan yang jelas antar grup pada variabel dependen dan jika ada perbedaan, variabel independen manakah pada fungsi diskriminan yang membuat perbedaan tersebut, serta melakukan klasifikasi terhadap obyek ke dalam kelompok (Singgih Santoso, 2001). Prinsip utama dari analisis ini tidak lain adalah membuat model yang dapat secara jelas menunjukkan perbedaan (diskriminasi) antar isi variabel dependen (Crowner 1991, Ackerman, et.al, 2008; Ronald Levant, et.al, 2007).

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Sebelum mendeskripsikan variabel-variabel penelitian dilakukan terlebih dahulu

uji validitas dan reliabilitas instrumen-instrumen yang digunakan. Beberapa instrumen variabel telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua instrument yang digunakan untuk mengukur semua variable yang digunakan baik variable independent maupun variable dependent adalah karena menghasilkan p value (nilai sig) yang lebih rendah dari 0,05. Dengan demikian semua instrumen yang digunakan benar-benar dapat digunakan untuk mengukur kualitas variable masing-masing, yakni pemberdayaan kelembagaan, peningkatan akses koperasi terhadap sumber-sumber pendanaan, pemberdayaan sumber daya koperasi, pemberdayaan bidang produksi, peningkatan jaringan pemasaran, pemberdayaan informasi dan teknologi, dan kinerja pemberdayaan.

Hasil uji reliabilitas juga menunjukkan bahwa statistic *Cronbach's Alpha* untuk semua variable berada di atas 0,06, yakni 0,781 untuk pemberdayaan kelembagaan, 0,797 untuk peningkatan akses koperasi terhadap sumber-sumber pendanaan, 0,783 untuk pemberdayaan sumber daya koperasi, 0,782 untuk pemberdayaan bidang produksi, 0,804 peningkatan jaringan pemasaran, 0,809 untuk pemberdayaan informasi dan teknologi, dan 0,765 untuk kinerja pemberdayaan. Hal ini menunjukkan bahwa semua responden memberikan jawaban yang konsisten atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Analisis diskriminan terhadap faktor-faktor penentu efektivitas pemberdayaan koperasi (kinerja pemberdayaan) dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan katagori efektivitas pemberdayaan kedalam

pemberdayaan yang efektif (kode 1) dan pemberdayaan yang kurang efektif (kode 0). Pada penelitian ini kinerja pemberdayaan (variabel dependent) diukur melalui 17 indikator yang telah dinyatakan valid dan reliabel dalam uji validitas dan reliabilitas. Skor dari masing-masing indikator dijumlahkan sehingga menghasilkan nilai kinerja pemberdayaan koperasi. Nilai kinerja pemberdayaan tersebut dihitung rata-ratanya dan berdasarkan nilai rata-rata tersebut kategori efektivitas pemberdayaan dapat dibuat. Kategori pemberdayaan yang kurang efektif (kode 0) adalah skor kinerja pemberdayaan yang berada di bawah nilai rata-rata, sedangkan kategori pemberdayaan yang efektif (kode 1) adalah yang berada di atas nilai rata-rata.

Variabel independent atau variabel yang hendak diduga sebagai penentu efektivitas pemberdayaan (kinerja pemberdayaan) terdiri dari 6 (enam) variabel. Keenam variabel tersebut adalah pemberdayaan kelembagaan, peningkatan akses koperasi terhadap sumber pendanaan, pemberdayaan sumber daya koperasi, pemberdayaan bidang produksi, pengembangan jaringan pemasaran, dan pemberdayaan teknologi dan informasi. Masing-masing variabel independent diukur dengan indikator-indikator yang sudah dinyatakan valid dan reliabel dalam uji validitas dan reliabilitas. Cara menghitung nilai variabel independent dilakukan dengan menjumlahkan skor indikator dari variabel yang dimaksud. Nilai total inilah yang dipakai dalam perhitungan analisis diskriminan.

Setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat akan mendapatkan tanggapan beragam dari anggota masyarakat yang diberdayakan.

Pemberdayaan akan dirasakan efektif bila melalui pemberdayaan itu terjadi perubahan perilaku positif dari sebagian besar masyarakat yang diberdayakan. Sebaliknya, pemberdayaan akan dirasakan kurang efektif bila melalui pemberdayaan itu tidak terjadi perubahan positif dari sebagian besar anggota masyarakat yang diberdayakan atau walaupun terdapat perubahan perilaku, perubahan itu sangatlah kecil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata skor pemberdayaan kelembagaan koperasi untuk kelompok anggota koperasi yang menganggap pemberdayaan kurang efektif (77,23) lebih rendah dari rata-rata skor untuk kelompok anggota koperasi yang menganggap kinerja pemberdayaan efektif (90,04). Dalam pengertian lain, kelompok anggota koperasi yang menganggap pemberdayaan koperasi efektif, pemberdayaan kelembagaan koperasi dianggap sebagai faktor yang memiliki peran lebih besar dalam menentukan kinerja pemberdayaan dibanding dengan kelompok anggota yang menganggap pemberdayaan koperasi kurang efektif.

Rata-rata skor peningkatan akses koperasi terhadap sumber pendanaan untuk kelompok anggota koperasi yang menganggap pemberdayaan kurang efektif (44,17) lebih rendah dari rata-rata skor untuk kelompok anggota koperasi yang menganggap kinerja pemberdayaan efektif (51,03). Hal ini menunjukkan kelompok anggota koperasi yang menganggap pemberdayaan koperasi efektif, peningkatan akses koperasi terhadap sumber pendanaan dianggap sebagai faktor yang memiliki peran lebih besar dalam menentukan kinerja

pemberdayaan (efektivitas pemberdayaan) dibanding dengan kelompok anggota yang menganggap pemberdayaan koperasi kurang efektif.

Rata-rata skor pemberdayaan sumber daya koperasi untuk kelompok anggota koperasi yang menganggap pemberdayaan kurang efektif (41,02) lebih rendah dari rata-rata skor untuk kelompok anggota koperasi yang menganggap kinerja pemberdayaan efektif (48,93). Dalam pengertian lain, kelompok anggota koperasi yang menganggap pemberdayaan koperasi efektif, pemberdayaan sumber daya koperasi dianggap sebagai faktor yang memiliki peran lebih besar dalam menentukan kinerja pemberdayaan (efektivitas pemberdayaan)

yang menganggap pemberdayaan kurang efektif (47,89) lebih rendah dari rata-rata skor untuk kelompok anggota koperasi yang menganggap kinerja pemberdayaan efektif (54,91). Dalam pengertian lain, kelompok anggota koperasi yang menganggap pemberdayaan koperasi efektif, pemberdayaan bidang produksi dianggap sebagai faktor yang memiliki peran lebih besar dalam menentukan kinerja pemberdayaan (efektivitas pemberdayaan) dibanding dengan kelompok anggota yang menganggap pemberdayaan koperasi kurang efektif.

Rata-rata skor pengembangan jaringan pemasaran untuk kelompok anggota koperasi yang menganggap pemberdayaan

Tabel 2 : Hasil perhitungan perbedaan rata-rata antar group pemberdayaan kurang efektif dan pemberdayaan efektif

Kinerja Pemberdayaan		Mean	Std. Deviation	Valid N (listwise)	
				Unweighted	Weighted
Kurang efektif	Kelembagaan	77.23	11.957	87	87.000
	Sumber Pendanaan	44.17	9.034	87	87.000
	Sumber Daya	41.02	7.981	87	87.000
	Bidang Produksi	47.89	10.377	87	87.000
	Jaringan Pemasaran	40.83	15.481	87	87.000
	Teknologi & Informasi	30.15	14.593	87	87.000
Efektif	Kelembagaan	90.04	8.366	69	69.000
	Sumber Pendanaan	51.03	5.171	69	69.000
	Sumber Daya	48.93	6.098	69	69.000
	Bidang Produksi	54.91	7.918	69	69.000
	Jaringan Pemasaran	48.75	11.944	69	69.000
	Teknologi & Informasi	45.90	15.464	69	69.000
Total	Kelembagaan	82.90	12.280	156	156.000
	Sumber Pendanaan	47.21	8.287	156	156.000
	Sumber Daya	44.52	8.196	156	156.000
	Bidang Produksi	50.99	9.976	156	156.000
	Jaringan Pemasaran	44.33	14.531	156	156.000
	Teknologi & Informasi	37.12	16.871	156	156.000

Sumber : Data primer yang diolah, hasil print out komputer, 2012.

dibanding dengan kelompok anggota yang menganggap pemberdayaan koperasi kurang efektif.

Rata-rata skor pemberdayaan bidang produksi untuk kelompok anggota koperasi

kurang efektif (40,83) lebih rendah dari rata-rata skor untuk kelompok anggota koperasi yang menganggap kinerja pemberdayaan efektif (48,75). Hal ini menunjukkan bahwa kelompok anggota koperasi yang menganggap pemberdayaan koperasi

efektif, pengembangan jaringan pemasaran dianggap sebagai faktor yang memiliki peran lebih besar dalam menentukan kinerja pemberdayaan (efektivitas pemberdayaan) dibanding dengan kelompok anggota yang menganggap pemberdayaan koperasi kurang efektif.

Rata-rata skor pemberdayaan teknologi dan informasi untuk kelompok anggota koperasi yang menganggap pemberdayaan kurang efektif (30,15) lebih rendah dari rata-rata skor untuk kelompok anggota koperasi yang menganggap kinerja pemberdayaan efektif (45,90). Dalam pengertian lain, kelompok anggota koperasi yang menganggap pemberdayaan koperasi efektif, pemberdayaan teknologi dan informasi dianggap sebagai faktor yang memiliki peran lebih besar dalam menentukan kinerja pemberdayaan (efektivitas pemberdayaan) dibanding dengan kelompok anggota yang menganggap pemberdayaan koperasi kurang efektif.

Untuk menguji apakah benar-benar terjadi perbedaan yang nyata antar kelompok variabel independen yang diteliti digunakan *test of equality group means* dengan menggunakan uji F. Bila melihat dari hasil print out komputer (Tabel 3), maka nilai sig untuk semua variabel independen berada di bawah 0,05, artinya memang terdapat perbedaan secara nyata antar kelompok diantara ke-enam variabel independen tersebut. Kelompok anggota koperasi yang menganggap pemberdayaan efektif memang benar-benar dipengaruhi oleh pandangan mereka terhadap pemberdayaan kelembagaan, peningkatan akses koperasi terhadap sumber pendanaan, pemberdayaan sumber daya koperasi, pemberdayaan

bidang produksi, pengembangan jaringan pemasaran, dan pemberdayaan teknologi dan informasi. Ada keyakinan bahwa apabila kelembagaan koperasi diperbaiki, akses koperasi terhadap sumber pendanaan dipermudah, sumber daya koperasi dikembangkan, bidang produksi dikembangkan, jaringan pemasaran diperluas, dan pengetahuan teknologi dan informasi ditingkatkan, kinerja pemberdayaan akan lebih meningkat.

Tabel 3 : Hasil uji beda antar group masing-masing variable

Tests of Equality of Group Means				
	Wilks' Lambda	F	df1	df2
Kelembagaan	.730	57.052	1	154
Sumber Pendanaan	.830	31.529	1	154
Sumber Daya	.769	46.246	1	154
Bidang Produksi	.877	21.643	1	154
Jaringan Pemasaran	.926	12.282	1	154
Teknologi & Informasi	.784	42.512	1	154

Sumber : Data primer yang diolah, hasil print out komputer, 2012.

Berdasarkan tabel *variables entered / removed* diketahui bahwa hanya 3 (tiga) variabel yang dapat dimasukkan pada persamaan diskriminan. Ketiga variabel tersebut adalah pemberdayaan kelembagaan, pemberdayaan teknologi dan informasi dan pengembangan jaringan pemasaran. Dengan demikian, efektif tidaknya suatu pemberdayaan koperasi dipengaruhi oleh sikap anggota koperasi RT dalam merespon pemberdayaan kelembagaan, pemberdayaan teknologi dan informasi, dan pengembangan jaringan pemasaran. Sementara itu, variabel-variabel yang lain seperti pemberdayaan

bidang produksi, peningkatan akses terhadap sumber pendanaan dan pemberdayaan sumber daya koperasi bukanlah variabel yang mempengaruhi kinerja pemberdayaan.

Temuan ini diperkuat dengan hasil perhitungan *Eigenvalue* yang menunjukkan canonical correlation sebesar 0,621 atau koefisien determinasi sebesar 0,3856 (38,56%). Angka tersebut menunjukkan 38,56 persen dari variable kinerja pemberdayaan dapat dijelaskan oleh model diskriminan yang terbentuk, yakni hanya

menganggap pemberdayaan koperasi efektif memang berbeda dengan perilaku kelompok anggota yang menganggap pemberdayaan kurang efektif.

Dari 6 variabel independen yang dianggap sebagai penentu kinerja pemberdayaan koperasi, hanya 3 variabel yang menentukan kinerja pemberdayaan koperasi. Ketiga variabel tersebut adalah pemberdayaan kelembagaan, pemberdayaan teknologi dan informasi dan pengembangan jaringan pemasaran. 3 variabel lain yakni pemberdayaan bidang produksi,

Tabel 4 : Variabel masuk dalam persamaan diskriminan

Step	Entered	Min. D Squared					
		Statistic	Between Groups	Exact F			
				Statistic	df1	df2	Sig.
1	Kelembagaan	1.483	Tidak efektif and Efektif	57.052	1	154.000	3.511E-12
2	Teknologi & Informasi	2.092	Tidak efektif and Efektif	39.995	2	153.000	1.066E-14
3	Jaringan Pemasaran	2.509	Tidak efektif and Efektif	31.769	3	152.000	5.325E-16

Sumber : Data primer yang diolah, hasil print out komputer, 2012.

oleh 3 (tiga) variable, yaitu pemberdayaan kelembagaan, pemberdayaan teknologi dan informasi dan pengembangan jaringan pemasaran. Sisanya, sebesar 61,44 persen dijelaskan oleh variabel lain yang berada di luar model.

Kemudian berdasarkan perhitungan *Wilks' Lambda* yang menghasilkan nilai *Wilks' Lambda* sebesar 0,615 dan *Chi-square* sebesar 74,230 dengan angka probabilitas (sig) sebesar 0,000 yang lebih rendah dari 0,05 diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok (anggota yang menganggap pemberdayaan kurang efektif dan yang menganggap efektif) pada model diskriminan. Dengan demikian perilaku kelompok anggota koperasi yang

peningkatan akses terhadap sumber pendanaan dan pemberdayaan sumber daya koperasi tidak memenuhi syarat masuk model diskriminan.

Tabel 5 : Hasil perhitungan Eigenvalue, Canonical Correlation dan Wilks' Lambda

Function	Eigenvalue	% of Variance	Cumulative %	Canonical Correlation	
1	.627 ^a	100.0	100.0	.621	
Test of Function(s)		Wilks' Lambda	Chi-square	df	Sig.
1		.615	74.230	3	.000

Sumber : Data primer yang diolah, hasil print out komputer, 2012

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemberdayaan atau efektivitas

pemberdayaan koperasi sangat sensitif terhadap dua variable pertama yaitu pemberdayaan kelembagaan dan pemberdayaan teknologi informasi. Meskipun demikian, variable pemberdayaan kelembagaan merupakan variable yang paling membedakan (*discriminant the most*) dalam pengertian pemberdayaan kelembagaan merupakan factor yang paling membedakan sebuah pemberdayaan koperasi tersebut efektif atau kurang efektif. Pemberdayaan teknologi dan informasi merupakan variable pembeda penting urutan berikutnya.

Variabel pembeda berikutnya adalah pengembangan jaringan pemasaran (*discriminant the least*). Variabel terakhir ini merupakan factor pembeda penting yang tetap perlu diperhatikan dalam meningkatkan efektivitas pemberdayaan, meskipun tingkat kepentingannya masih berada di bawah pemberdayaan kelembagaan dan pemberdayaan teknologi dan informasi. Dengan demikian jika sasaran pemberdayaan koperasi RT adalah meningkatkan efektivitas pemberdayaan (kinerja pemberdayaan), maka pihak-pihak yang berkepentingan seperti Manajemen koperasi itu sendiri, Pemerintah, Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga tertentu yang berminat mengembangkan koperasi RT di Kab. Wonogiri, factor utama yang perlu dikembangkan adalah pemberdayaan kelembagaan, baru kemudian pemberdayaan teknologi dan informasi pada tahap berikutnya. Pengembangan jaringan pemasaran juga penting untuk dikembangkan, namun tingkat kepentingannya masih lebih rendah dibanding kedua factor di atas.

Berdasarkan tabel *Classification Results* diketahui bahwa pada bagian original terlihat kelompok anggota koperasi RT yang pada data awal menganggap pemberdayaan kurang efektif sebanyak 87 anggota dan dari model diskriminan tetap pada kelompok anggota yang menganggap pemberdayaan kurang efektif sebanyak 66 anggota koperasi. Sedangkan dengan model diskriminan, mereka yang awalnya masuk kelompok anggota yang menganggap pemberdayaan kurang efektif ternyata menjadi anggota kelompok anggota koperasi RT yang menganggap pemberdayaan efektif sebanyak 21 anggota. Demikian juga dengan kelompok anggota yang menganggap pemberdayaan koperasi efektif, yang tetap berada pada kelompok anggota yang menganggap pemberdayaan efektif sebanyak 60 anggota koperasi dan yang menjadi kelompok anggota yang menganggap kinerja pemberdayaan kurang efektif sebanyak 9 anggota. Dengan demikian ketepatan prediksi dari model ini adalah : $(66 + 60) / 156 = 0,8077$ atau 80,77 %. Angka ketepatan ini cukup tinggi, sehingga model diskriminan yang dipakai di atas dapat digunakan untuk analisis diskriminan. Dengan kata lain penafsiran terhadap beberapa table yang dihasilkan dari analisis diskriminan yang dicantumkan di atas adalah valid untuk digunakan. Selain itu, berdasarkan metode *Leave-one-out cross validation* diketahui angka ketepatan klasifikasi data ke grup sebesar 80,8 % yang cukup tinggi sehingga model ini dapat digunakan untuk analisis diskriminan.

Arti penting dari hasil penelitian ini adalah faktor yang paling menentukan kinerja pemberdayaan koperasi RT

adalah pemberdayaan kelembagaan, pengembangan jaringan pemasaran dan pemberdayaan teknologi dan informasi. Ketiga variabel tersebut harus menjadi prioritas dalam pemberdayaan koperasi RT.

Prioritas pertama dalam pemberdayaan adalah pemberdayaan kelembagaan. Pemberdayaan kelembagaan tersebut dapat dilakukan dengan cara masih tetap menganjurkan masyarakat untuk mendirikan koperasi bagi warga RT yang belum memiliki koperasi, aktif mensosialisasikan aturan main penyelenggaraan koperasi RT, mempermudah perijinan dan perolehan badan hukum, memberikan kemudahan untuk menjadi anggota koperasi RT, aktif menganjurkan anggota masyarakat untuk memanfaatkan koperasi sebagai sarana pengembangan usaha mikro miliknya, aktif membantu pengembangan usaha koperasi RT dan anggotanya, Pemerintah Daerah tetap berkomitmen dan termotivasi untuk membangkitkan peran koperasi dalam perekonomian daerah melalui pengembangan koperasi, dan ikut aktif menjembatani hubungan usaha mikro anggota koperasi dengan perusahaan-perusahaan besar.

Prioritas yang kedua adalah pengembangan jaringan pemasaran. Pada umumnya, usaha kecil dan menengah, terutama di pedesaan tidak memiliki jaringan pemasaran yang kuat. Mereka mampu membuat produk dalam jumlah yang cukup banyak, tapi mengalami kesulitan dalam pemasaran. Oleh karena itu, faktor yang terpenting bagi mereka adalah menemukan pasar baru yang lebih luas. Oleh karena keterbatasan sumber daya koperasi dalam pencarian

pasar baru dan pembentukan jaringan pemasaran, maka pemilik usaha kecil dan usaha mikro di pedesaan perlu dibantu oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Pemerintah Daerah beserta jajaran instansi yang terkait, BUMN dan BUMS, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, maupun perguruan tinggi.

Pemberdayaan mengenai pengembangan jaringan pemasaran koperasi RT dan anggotanya dapat dilakukan dengan cara ikut aktif dalam membantu mempromosikan dan memasarkan hasil produksi koperasi RT dan anggotanya, aktif dalam mengembangkan sarana pemasaran hasil produksi koperasi (misal gedung pameran, perbaikan pasar, tempat berjualan, dll), aktif mengikutsertakan anggota koperasi RT dalam pameran-pameran produk yang dihasilkan koperasi dan anggotanya, aktif mendorong anggota koperasi untuk menjadikan koperasi sebagai jaringan pemasaran bagi produk-produknya, dan aktif membantu pembentukan jaringan usaha guna memudahkan penjualan produk-produk koperasi dan anggotanya.

Prioritas ketiga adalah pemberdayaan teknologi dan informasi. Pemberdayaan ini diperlukan mengingat masih banyak koperasi RT yang belum memiliki komputer, SDM-nya belum familier dengan komputer dan apalagi dengan internet. Di samping itu, pemberdayaan teknologi dan informasi tersebut penting untuk menghindari keterpurukan akibat tidak mampu bersaing dalam era global. Pemberdayaan ini dapat dilakukan dengan cara penyediaan perangkat keras, penyediaan perangkat lunak, penyediaan sistem jaringan, dan optimalisasi fungsi dan sasaran penggunaan

teknologi dan jaringan, mendorong dan mengajari anggota koperasi RT dalam memanfaatkan teknologi komputer terutama pemanfaatan *perangkat lunak komputer* dan teknologi internet, serta fasilitasi dan aktifkan pelatihan-pelatihan mengenai pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mempromosikan produk dan membentuk jaringan usaha online.

Pemberdayaan bidang produksi, peningkatan akses terhadap sumber pendanaan koperasi dan pemberdayaan sumber daya bukan berarti tidak penting dalam pemberdayaan koperasi RT, tetapi pemberdayaan ini bisa jadi sudah biasa dilakukan atau belum sama sekali dilaksanakan sehingga respon terhadap kuesioner yang ditanyakan relatif seragam.

SIMPULAN

Secara umum, pemberdayaan yang dilakukan sudah dianggap efektif, artinya telah terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam berkoperasi. Hasil uji beda antar kelompok variabel independen menunjukkan bahwa apabila kelembagaan koperasi diperbaiki, akses koperasi terhadap sumber pendanaan dipermudah, sumber daya koperasi dikembangkan, bidang produksi diberdayakan, jaringan pemasaran diperluas, dan pengetahuan teknologi dan informasi ditingkatkan, kinerja pemberdayaan akan lebih meningkat.

Hasil analisis diskriminan menunjukkan tiga variabel independent yang dapat dimasukkan pada persamaan diskriminan, yakni pemberdayaan kelembagaan, pemberdayaan teknologi dan informasi, dan pengembangan jaringan pemasaran.

Dengan demikian, efektif tidaknya suatu pemberdayaan koperasi dipengaruhi oleh sikap anggota koperasi RT dalam merespon pemberdayaan kelembagaan, pemberdayaan teknologi dan informasi, dan pengembangan jaringan pemasaran. Sementara itu, variabel-variabel yang lain seperti pemberdayaan bidang produksi, peningkatan akses terhadap sumber pendanaan dan pemberdayaan sumber daya koperasi bukanlah variabel yang mempengaruhi kinerja pemberdayaan.

Model diskriminan yang ada ternyata valid dan dapat digunakan karena tingkat ketepatannya cukup tinggi (80,77 %) dan mempunyai *cross validation* yang cukup tinggi pula (80,8%), sehingga model yang terbentuk benar-benar dapat digunakan dalam analisis diskriminan. Oleh karena itu berbagai pihak yang terkait dengan upaya pemberdayaan koperasi RT dapat mengambil berbagai strategi yang relevan berdasarkan model diskriminan tersebut.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Terdapat 3 variabel yang sangat penting diperhatikan dalam pengembangan koperasi RT yakni pemberdayaan kelembagaan, penguatan jaringan pemasaran, dan pemberdayaan teknologi dan informasi. Ketiga variabel tersebut merupakan factor pembeda penting yang tetap perlu diperhatikan dalam pemberdayaan koperasi RT. Dengan demikian jika sasaran awal pemberdayaan koperasi RT adalah kualitas pemberdayaan atau keefektifan pemberdayaan itu sendiri, maka pihak-pihak yang berkepentingan seperti Pemerintah Daerah beserta instansi-instansi yang terkait, Perguruan Tinggi, BUMN dan BUMS, serta lembaga-lembaga

swadaya yang berminat memberdayakan koperasi RT, factor utama yang perlu diberdayakan adalah kelembagaan, baru kemudian pengembangan jaringan pemasaran, dan teknologi informasi pada tahap berikutnya. Faktor-faktor yang lain seperti pemberdayaan di bidang produksi, pemberdayaan sumber daya, dan akses terhadap sumber pendanaan bukanlah faktor yang dianggap penting untuk diberdayakan. Hasil penelitian ini juga menyarankan perlunya dibuat model komprehensif dalam pemberdayaan koperasi RT yang berfokus pada pemberdayaan kelembagaan, pembentukan jaringan pemasaran, dan penguasaan teknologi dan informasi. Ketiga variable tersebut merupakan variable yang sangat sensitive terhadap kinerja pemberdayaan.

Daftar Referensi

- Ackerman, Joshua T; Takekawa, John Y; Bluso, Jill D; Yee, Julie L; Eagles-Smith, Collin A. 2008. **Gender Identification of Caspian Terns Using External Morphology**. *The Wilson Journal of Ornithology*; Jun 2008; 120, 2; ProQuest Biology Journals. Pg. 378
- Bappenas, BPS dan UNDP. 2001. **Indonesia Human Development Report 2001 Towards a New Consensus : Democracy and Human Development in Indonesia**. www.Undp.or.id.
- Crownover, Richard M. 1991. **A Least Squares Approach to Linear Discriminant Analysis**. *SIAM J. Sci. STAT. COMPUT.* Vol. 12, No. 3, pp. 595-606 Society for Industrial and Applied Mathematics.
- Davoud Mojtahed. 2007. **Conflict Management of Cooperative Organizations in Contemporary Iran: A Review Analysis**. *Public Organiz Rev* (2007) 7:163–180. Management Department, Management Development Institute of Iran, No. 6, 21 St., Sanaee St., Motahari Ave., Tehran, Iran.
- Ferdinand, Agusty. 2000. **Manajemen Pemasaran Sebuah Pendekatan Strategik**. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____. 2006. **Metoda Penelitian Manajemen**. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Farazmand, A. 2006. The capacity to manage in the age of rapid changes and globalization. *Iranian Journal of Management Sciences: A Quarterly*, 1(1): 157–188.
- Friedmann, J. 1992. **Empowerment: the politics of alternative development**. California: Blackwell.
- Hadar, I.A. 2006. **Hak Atas Tanah**. Kompas 15 Desember 2006.
- Hanel, Alfred. 1988. **Organisasi Koperasi**. Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Hendar dan Kusnadi. 2005. **Ekonomi Koperasi**. Edisi Dua. Lembaga Penerbit UI. Jakarta.
- Hendar. 2010. **Manajemen Perusahaan Koperasi**. Edisi I. Penerbit Erlangga. Jakarta.

- ICA News, No. 5/6, 1996. **Co-operative Information, Statement on the Co-operative Identity.**
- Ifè, K. 1995. **Comunnity Development : Creating Community Alternatives-Vision,Analisy And Practice.** Malbourne. Longman;
- Imam Ghazali. 2004. **Model Persamaan Struktural, Konsep dan Aplikasi dengan Program AMOS Ver. 5.0.** Badan Penerbit Universitas Diponogoro. Semarang.
- Krisnamurthi, B. 1998. **Perekembangan Kelembagaan dan Perilaku Usaha Koperasi Unit Desa di Jawa Barat (Desertasi).** Bogor. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Kenny, S. 1999. **Developing Communities for the future : Community Development in Australia.** 2nd ed. Melbourne : Nelson ITP.
- Li Zhao, Caroline Gijssels, (2011). **Multi-stakeholder co-operatives in China: a resource mix structure approach.** Social Enterprise Journal, Vol. 7 Iss: 3, pp.259 - 279
- Muenkner, Hans. 1989. **Pengantar Hukum Koperasi, Dengan Acuan Khusus Mengenai Perundang-undangan Koperasi di Indonesia.** Bandung. Universitas Padjadjaran.
- [PNganwa](#), [MLyne](#) & [SFerrer](#). 2010. **What will South Africa's new Cooperatives Act do for small producers? An analysis of three case studies in Kwa Zulu-Natal.**
- Agrekon. [Volume 49, Issue 1](#), pages 39-55
- Pranarka, AMW dan Vidhyandika, Moeljarto. 1996. **Pemberdayaan Empowerment). Di Dalam: Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi".** CSIS. Jakarta.
- Plummer, J. 2000. **Municipalities and community participation : a sourcebook for capacity development.** London : Farthcan.
- Rahmat Imam Santosa. 2006. **Penguatan Kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga untuk Meningkatkan Keberdayaan Anggota.** Tesis. IPB Bogor.
- Ronald Levant & Katherine Richmond & Stephen Cook & A. Tanner House & Maryse Aupont. 2007. **The Femininity Ideology Scale: Factor Structure, Reliability, Convergent and Discriminant Validity, and Social Contextual Variation.** Sex Roles (2007) 57:373–383. Published online: 3 July 2007. Springer Science + Business Media, LLC 2007
- Roopke, Jochen. 1987. **The Economic Theory of Cooperative Enterprise in Developing Countries, With Special Reference of Indonesia.** Marburg, German.
- Roopke, Jochen. 1992. **Rebuilding Cooperatives for A New Country (on The Future of Indonesian Cooperative).** Jurnal Koperasi Indonesia Tahun VII – No. 1 – 1992. Jatinangor – Bandung. IKOPIN.
- Roopke, Jochen. 1992. **Strategik Management of Self-Help Organization.** Marburg – German.

- Roopke, Jochen. 1992. **Cooperative Entrepreneurship**. Marburg – German. _____, UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia
- Setiana Lubis. 2005. **Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat**. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Shad S Morris, Warner P Woodworth and Shon R Hiatt. 2006. **The Value of Networks in Enterprise Development : Case Studies in Eartern Europe and Southeast Asia**. Journal of Developmental Entrepreneurship. Vol. 11, No. 4 (2006) 345–356. © World Scientific Publishing Company.
- Suharto, E. 2005. **Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosisl dan Pekerjaan Sosial**. Refina Aditama. Bandung.
- Yusof Ismail and Suhaimi Mhd Sarif (2010). **Convergence of global and traditional managers’ characteristics: a case of senior management of cooperatives in Malaysia**. Journal for International Business and Entrepreneurship Development. Volume 5, Number 1, pp 28 – 47
- Tylor, M. 2003. **Public Policy in the Community**. New York : Palgrave Macmillan.
- Tim Crescent. 2003. **Menuju Masyarakat Mandiri : Pengembangan Model Sistem Keterjaminan Sosial**. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Tim Koordinasi Nasional PPK. 2002. **Pedoman Umum Program Pengembangan Kecamatan**. Fase II. Jakarta.
- Wignyo Adiyoso. 2009. **Menggugat Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat**. Putra Media Nusantara. Surabaya.